

IMPLEMENTATION OF THE WASTE BANK PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY INCOME IN LABUKKANG DISTRICT, PAREPARE CITY

Aslinda¹, Andi Anggi Sonia², Muhammad Guntur^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
e-mail: m.guntur@unm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the Waste Bank Program in Labukkang Subdistrict in increasing community income as measured by standard indicators and policy targets, resources, relationships between organizations, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions, and the disposition of implementers. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection was carried out using field observation techniques, interviews and documentation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of the waste bank program in increasing community income in the Labukkang sub-district, Parepare City is still not optimal. Based on the Van Meter and Van Horn indicators, the management of the Labukkang waste bank is quite good in terms of factors, namely: 1) Policy standards and targets, 2) Relationships between organizations, 3) Characteristics of implementing agents, 4), implementor disposition. Meanwhile, the resource indicator is still not optimal from a financial perspective, namely the facilities and infrastructure are still inadequate, the Labukkang waste bank does not have incentive funds from the government, it only receives assistance in the form of goods. Meanwhile, for indicators of socio-political and economic conditions, the Labukkang waste bank has obstacles from social factors, namely from a total of 2,217 family heads with only 129 waste bank customers, economic factors are very influential in increasing people's income, and for politics it does not have a significant influence on Labukkang waste bank.

Keywords: *Implementation, waste bank program, community*

PENDAHULUAN

Lingkungan memiliki pengaruh yang penting bagi manusia. Lingkungan dianggap sebagai tempat manusia melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. Lingkungan hidup masyarakat merupakan faktor penting yang mendukung segala aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk menunjang segala aktivitas manusia, maka perlunya menjaga lingkungan dan kebersihannya sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di tempat tersebut.

Menjaga lingkungan dan kebersihannya merupakan tanggung jawab manusia untuk menghindari berbagai macam jenis penyakit. Dalam menjaga lingkungan memiliki tantangan yang disebabkan oleh sampah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pengertian sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Indonesia menghadapi masalah pengelolaan sampah yang kompleks karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah akibat pembuangan sampah sembarangan. Masalah lingkungan

hidup pemukiman telah menjadi perhatian khusus yang perlu ditangani dan diselesaikan dengan cepat. Situasi ini digambarkan oleh pengelolaan sampah kota yang kurang efektif. Sampah yang merupakan bagian dari aktivitas manusia harus dikelola secara efektif agar tidak menimbulkan berbagai masalah bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan tanggung jawab yang jelas. Kewenangan pemerintah kota dan peran masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah yang profesional, efektif dan efisien.

Secara umum model pengelolaan sampah di Indonesia hanya melalui tahapan yang paling sederhana, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan kemudian pengolahan. Model pengolahan sampah ini telah ada selama beberapa dekade dan telah menjadi kebijakan umum yang diterapkan oleh pemerintah. Model pengelolaan sampah berjalan karena didasarkan pada pemikiran bahwa sampah hanya barang tidak berguna dan harus dibuang.

Diperlukan solusi alternatif untuk mengelola sampah lebih beragam. Alternatif tersebut dapat berupa kemitraan perusahaan, pembenahan sistem operasi TPA dengan teknologi yang lebih canggih, membangun bank sampah, dan melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Bank sampah merupakan tempat untuk menyimpan sampah yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis sampahnya, sampah yang ditabung di bank sampah merupakan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Operasional bank sampah pada umumnya sama dengan bank lain, semuanya memiliki nasabah, akuntansi dan manajemennya, jika di bank umumnya kita mengetahui yang disetorkan nasabah adalah uang tetapi di bank sampah yang disetorkan merupakan anorganik.

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan program bank sampah dan diresmikan pada tanggal 26 Januari 2016 dan masih berjalan sampai sekarang. Bank sampah akan mengambil sampah anorganik yang dikumpulkan oleh masyarakat dan masyarakat akan menjadi nasabah. Jadi masyarakat yang menabung sampah nantinya dapat menjadi pendapatan bagi mereka.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Timbunan Sampah ke TPA Aloppe Kota Parepare

No	TAHUN	Jumlah Sampah Terangkut ke TPA (ton)		Timbunan Sampah Kota Parepare (ton)
		Organik	Anorganik	
1	2018	10,524,560	7,859,010	26,227
2	2019	10,988,530	8,180,850	26,751
3	2020	11,511,610	8,528,650	27,266
4	2021	11,613,170	8,991,870	27,832

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah sampah organik dan sampah anorganik di Kota Parepare yang semakin meningkat setiap tahun dan akan menimbulkan permasalahan sampah. Pada tahun 2018 timbunan sampah sebanyak 26.227 ton, pada tahun 2019 timbunan sampah sebanyak 26.751 ton, pada tahun 2020 timbunan sampah sebanyak 27.226 ton, dan pada tahun 2021 timbunan sampah sebanyak 27.832 ton. Besarnya jumlah sampah dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan material maka akan semakin besar volume sampah yang akan meningkat tiap tahunnya. Dalam pelaksanaan program bank sampah maka dibutuhkan peran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh bahwa masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya di bank sampah masih kurang sampah yang memiliki nilai ekonomis hanya dibuang dengan sampah lain tanpa dipilah. Melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar program bank

sampah bisa berjalan dengan baik. Selain itu program bank sampah akan berjalan dengan baik jika pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat mampu berkontribusi dalam program bank sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare. Masyarakat bisa memanfaatkan program bank sampah agar dapat membantu dalam peningkatan pendapatannya.

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Program Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik umumnya yaitu upaya atau tindakan pemerintah terkait dengan memenuhi kewajiban negara dalam bentuk pengaturan atau keputusan. Pada kenyataannya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Sedangkan kebijakan menurut Thomas R. Dye (1992) yaitu: Menurut Thomas R. Dye (1992), “Public Policy is the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. (Anggara, 2018, p. 35).Selanjutnya menurut Chief J.O. Udoji (1981), mendefinisikan public policy sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. (Abdoellah & Rusfiana, 2016, p. 17). Contoh kebijakan didefinisikan sebagai: 1) Undang-undang, 2) peraturan pemerintah, 3) Keputusan Presiden, 4) Keputusan Menteri, 5) Peraturan Daerah, 6) Keputusan Bupati, dan 7) Keputusan Direktur dan lainnya. Dokumen kebijakan ini sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan.

James Anderson (1970) dalam Anggara (2018) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

- a. *Substantive and Procedural Policies*
- b. *Distributive, Redistributive, and Regulatory policies*
- c. *Material Policy*
- d. *Publik Goods and Private Goods Policies*

Dalam pandangan Ripley (dalam Subarsono), tahapan-tahapan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan Agenda Kebijakan
2. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan
3. Tahap Implementasi kebijakan.
4. Tahapan Evaluasi terhadap Implementasi, kinerja dan Dampak Kebijakan

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah agenda politik harus dilaksanakan untuk memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2016) sebagaimana mengatakan bahwa:

Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa:

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2016, p. 128).

c. Model model Implementasi Kebijakan Publik

Model merupakan presensi ringkasan dan bagian operasional, tetapi penggunaannya diperlukan untuk bagian operasional, tetapi penggunaannya diperlukan untuk tujuan analisis/penelitian, yang nilainya akan tergantung pada kompleksitas masalah politik yang dipelajari dan dianalisis untuk tujuan yang sama.

Model implementasi kebijakan top down generasi pertama yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

1. George C. Edwards III, dalam *implementing public policy*, 1980 dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016).
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Struktur Birokrasi
 - d. Disposisi Implementor
2. Merilee S. Grindle 1980, dalam (Suharno, 2016)
 - a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups.
 - c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
 - d. Apakah letak program sudah tepat.
 - e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementasinya dengan rinci.
 - f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
3. Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier, disebut *A Framework for Implementation Analysis*, 1980, dalam (Suharno 2016).
 - a. Karakteristik masalah (*Tractability of the problems*)
 - b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
 - c. Variabel lingkungan (*non statutory affecting implementation*).
4. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) disebut *A model of the policy implementation process*, dalam (Suharno 2016).
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Hubungan antar organisasi
 - d. Karakteristik agen pelaksana
 - e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
 - f. Disposisi implementor

2. Konsep Kebijakan Pengelolaan Sampah

a. Sampah

Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan atau/ proses alam yang berbentuk padat. Adapun pengertian lainnya yaitu semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang berbentuk padat, lumpur (*sludge*). Cair maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Walaupun dianggap sudah tidak berguna dan tidak dikehendaki, namun bahan tersebut kadang-kadang masih dapat dimanfaatkan kembali atau dijadikan bahan baku (Koestomo, 2011, p. 5).

Menurut Artiningsih (2008) dalam Ayuningtyas, mengatakan bahwa sampah padat dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Adapun yang termasuk sampah organik yaitu sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastic), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Jenis sampah ini yaitu kaleng, botol gelas, tas plastik dan baju (Ayuningtyas et al., 2020).

Berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan UU dapat terdiri:

1. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah sejenis rumah tangga, dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sampah spesifik

Sampah spesifik meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan beracun
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Sampah yang timbul akibat bencana.
- d. Puing bongkaran bangunan
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

b. Pengelolaan Sampah

Sri Bebasari dalam Yudiyanto mengatakan ada 5 (lima) aspek yang dapat menyelesaikan masalah sampah yaitu:

1. Aspek hukum

Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita adalah kurangnya kebijakan nasional, yang menyebabkan ketidakpastian peraturan daerah dalam menentukan dasar hukumnya.

2. Aspek Instansi

Masalah sampah berlarut-larut karena tidak ada otoritas khusus yang secara khusus menangani masalah ini.

3. Aspek pendanaan

Ada paradigma tentang budaya sampah di masyarakat. Selama ini masyarakat menganggap sampah hanyalah sampah.

4. Peran Serta Masyarakat

Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini.

2. Teknologi

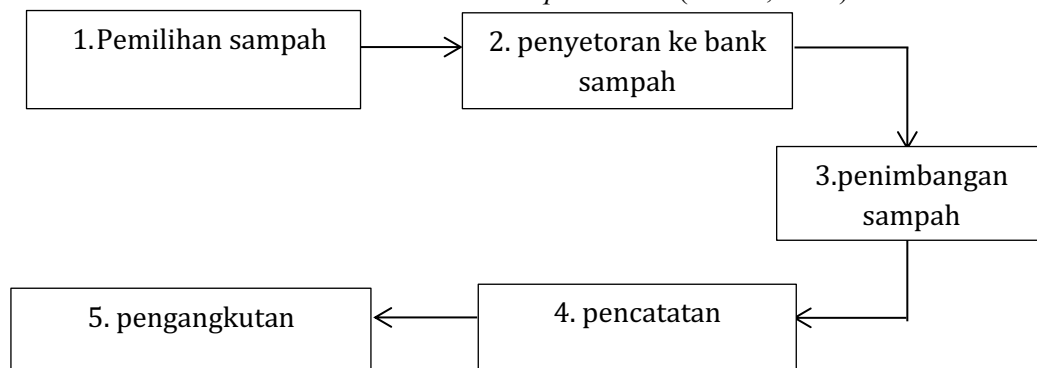
Penelitian teknis tentang masalah sampah masih kurang. Menanggapi masalah ini, ia menetapkan tujuan bahwa pengelolaan sampah kita harus dimulai dari sumbernya rumah, industri, pertanian, pasar, perkantoran, hotel setidaknya dalam 25 tahun ke depan.

c. Konsep Bank Sampah

Konsep Bank berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 13 tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah adalah tempat dimana sampah dipisahkan menurut jenisnya, sampah yang disimpan di bank sampah merupakan sampah yang bernilai ekonomis. Bank sampah umumnya beroperasi dengan cara yang sama seperti bank lain yang memiliki nasabah, akuntansi, dan manajemen. Bank pada umumnya menyeter uang oleh nasabah, sedangkan yang dititipkan di bank sampah adalah sampah dengan harga yang ekonomis. (Setiawati, Sri, 2018).

Sistem bank sampah dalam (Ikhsan, 2016) pada umumnya yang ada di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Sistem Bank Sampah dalam (Ikhsan, 2016)



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5 mengenai pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui bank sampah, adapun sistem kerja bank sampah yaitu:

1. Pemilahan sampah

Nasabah atau masyarakat wajib memilih sampahnya berdasarkan jenis materialnya seperti: plastik, kertas, besi, kaca dan lain-lain.

2. Penyetoran ke bank sampah

Sampah yang sudah dipilah selanjutnya dilakukan penyetoran sampah ke bank sampah sesuai waktu kesepakatan.

3. Penimbangan sampah

Sampah yang sudah disetor di bank sampah selanjutnya akan ditimbang sesuai jenis sampah yang dikumpulkan.

4. Pencatatan

Pengelola bank sampah mencatat jenis dan berat sampah setelah ditimbang. Hasil penimbangan kemudian dicatat dalam buku tabungan. Setelah dilakukan pencatatan kemudian dilakukan bagi hasil dari penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

5. Pengangkutan

Bank sampah sudah melakukan kerja sama dengan pengepul, sehingga sampah yang telah terkumpul kemudian dibawa ke tempat pengolahan sampah berikutnya. (Dhita Pratiwi, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun, penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi dan tabel. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyimpulkan makna dari hasil analisis dalam bentuk teks/narasi.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pemantauan secara langsung terhadap gejala-gejala mengenai program bank sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare.

b. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pengelola program bank sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik dimana dapat memperoleh data dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan mengutip dari sumber lain dengan tujuan untuk melengkapi data primer seperti literatur, berita online, koran, jurnal ilmiah, media sosial, dan buku-buku serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan bank sampah Labukkang.. Data tersebut digunakan untuk mendukung korelasi data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk melengkapi data primer.

Pada penelitian ini digunakan triangulasi sumber dimana pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan sumber yang sama. Data yang diperoleh dari informan kemudian dianalisis dan dilihat kesesuaian informasi yang diberikan. Informasi yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih untuk menjadi bahan pertimbangan kemudian ditarik kesimpulannya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator teori Van Meter dan dan Horn dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil penelitian ini merupakan interpretasi atau penggambaran hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan konsep para ahli, dan teori sehingga bisa mendeskripsikan hasil data penelitian dan fakta di lapangan.

Penelitian ini dihubungkan dengan indikator teori Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini menjelaskan bahwa dalam program bank sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan masyarakat menggunakan indikator dari teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Teori Van Meter dan Van Horn mengenai indikator pertama standar dan sasaran kebijakan menjadikan indikator ini memiliki tujuan kebijakan yang penting. Standar dan sasaran kebijakan sangat dibutuhkan dalam segala kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta karena dengan standar dan sasaran kebijakan yang jelas maka kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini implementasi program bank sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare, peneliti menemukan bahwa hasil penelitian berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dalam indikator standar dan sasaran kebijakan di bank sampah Labukkang hanya menggunakan mekanisme alur bank sampah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program bank sampah di Kelurahan Labukkang. Mekanisme alur bank sampah di Kelurahan Labukkang sudah dipahami oleh semua pengurus dan tim pengelola bank sampah. Adapun sasaran dalam program bank sampah Labukkang yaitu ditujukan untuk masyarakat yang berada di wilayah kelurahan Labukkang dan yang berada di luar wilayah kelurahan Labukkang khususnya ibu rumah tangga.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam teori Van Meter dan Van Horn merupakan hal yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya menjadi pertimbangan yang penting karena dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan atau program.

Pertama sumber daya manusia yang dimiliki dalam program bank sampah Labukkang dalam pemilihan pengurus bank sampah berasal dari lembaga organisasi masyarakat dan honorer di Kelurahan Labukkang sedangkan untuk tim pengelola ditunjuk langsung yang diberi amanah dari kelurahan Labukkang untuk menjalankan program bank sampah kelurahan Labukkang. sumber daya manusia di bank sampah Labukkang hanya bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan gaji dan hanya mendapat keuntungan dari hasil penjualan sampah saja namun kinerja tim pengelola bank sampah sudah baik dan dilakukan secara maksimal. Akan tetapi sumber daya manusia di bank sampah bank sampah Labukkang masih membutuhkan pelatihan untuk untuk tahap pendaur ulangan sampah. Kedua mengenai sumber dana atau anggaran dalam program bank sampah Labukkang, program bank sampah Labukkang tidak memiliki anggaran dari pemerintah. Bank sampah Labukkang hanya mendapat bantuan barang dari pemerintah Lurah Labukkang dan bantuan dari PT. Pegadaian.

Ketiga terkait sumber daya sarana dan prasarana dalam program bank sampah Labukkang berdasarkan informasi dari para informan dan hasil pengamatan dari peneliti kelengkapan sarana dan prasarana masih belum memadai. Program bank sampah Labukkang masih kekurangan perlengkapan dalam menunjang proses pengelolaan bank sampah. seperti kendaraan motor karampa yang digunakan untuk menjemput sampah nasabah masih kurang hanya satu motor karampa dan digunakan bolak balik dalam menjemput sampah nasabah. Selain kendala dari kendaraan bank sampah juga tidak memiliki cukup lahan untuk mengelola sampah nasabah. Bank sampah Labukkang berdiri di belakang kantor Kelurahan Labukkang dan hanya memiliki luas $\pm 96m^2$. Banyaknya sampah nasabah bank sampah membuat tim pengelola kewalahan dalam pengelolaan yang disebabkan oleh lahan yang sempit.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan indikator ketiga dari teori Van Meter dan Van Horn. Pelaksanaan sebuah kebijakan dibutuhkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain maupun

masyarakat. hubungan dan koordinasi yang baik dapat antar instansi dapat menunjang keberhasilan sebuah kebijakan atau program.

Program bank sampah di Kelurahan Labukkang merupakan bank sampah unit. Bank sampah Labukkang binaan dari pemerintah kelurahan Labukkang dan kelompok organisasi swadaya masyarakat yaitu PKK, Babinsa, dan LPKM Labukkang. Hubungan antar bank sampah Labukkang dengan lurah Labukkang dan lembaga organisasi masyarakat dapat membantu dan memudahkan bank sampah ketika melakukan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat. ketika bank sampah melakukan sosialisasi atau perlombaan bank sampah pembina dari bank sampah membantu dalam menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan bank sampah dan memberikan informasi kepada masyarakat. Bank sampah Labukkang juga memiliki kerja sama dengan PT Pegadaian yang memberi keuntungan dalam pengelolaan bank sampah. kerja sama antara program bank sampah dengan PT Pegadaian dimulai pada tahun 2019 dan berjalan sampai sekarang.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan dalam indikator karakteristik agen pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn ingin melihat atau mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan hubungan yang terjadi dalam suatu kebijakan atau program yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan dan program tersebut. Kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik lembaga pelaksana yang tepat dan sesuai.

Dalam penelitian ini untuk indikator karakteristik agen pelaksana peneliti ingin melihat bagaimana bentuk pengawasan dan kerjasama timnya dalam mengimplementasikan program bank sampah di Kelurahan Labukkang. Program bank sampah Labukkang tidak memiliki spesifikasi pengawasan dalam menjalankan program bank sampah akan tetapi bank sampah Labukkang hanya mendapatkan binaan dari pemerintah Labukkang, lembaga organisasi masyarakat dan PT Pegadaian. karakteristik agen pelaksana di bank sampah Labukkang sudah baik, alokasi tugas di bank sampah Labukkang terstruktur dengan baik karena bank sampah Labukkang merupakan bank sampah unit dan ruang lingkup kerjanya kecil sehingga tim pengelola dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga pengelolaan sampah di kelurahan Labukkang nantinya dapat lebih berkembang.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam sebuah implementasi kebijakan faktor-faktor yang juga perlu diperhitungkan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan publik dari perspektif Van Meter dan Van Horn yaitu sejauh mana lingkungan eksternal memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan.

Program bank sampah di Kelurahan Labukkang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik. Pertama kondisi sosial atau lingkungan sosial berkaitan dengan masyarakat dan sasaran dari program bank sampah Labukkang yaitu masyarakat. jika banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program bank sampah maka akan berdampak tidak berjalannya program bank sampah tersebut. Lingkungan sosial di Kelurahan Labukkang belum bisa dikatakan baik. Namun masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan program bank sampah di kelurahan Labukkang karena nasabah di bank sampah Labukkang hanya berjumlah 129 orang dari total 2.217 kepala keluarga di Kelurahan Labukkang. Kedua lingkungan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam program bank sampah Labukkang sesuai dengan tujuan berdirinya volume sampah yang ada di Kelurahan Labukkang dengan memberikan solusi sampah dan dapat menambah pendapatan masyarakat. Dua jenis tabungan yang ada di bank sampah Labukkang yaitu tabungan biasa dan tabungan emas yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhannya. ketiga lingkungan politik dengan bank sampah Labukkang tidak terlalu berpengaruh dalam program bank sampah.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor dalam indikator Van Meter dan Van Horn merupakan indikator terakhir, dimana disposisi implementor dalam kebijakan atau program para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi harus memahami tanggung jawab dan kemampuan dalam mengimplementasikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan maka dapat dikatakan bahwa Disposisi implementor di bank sampah Labukkang dalam penelitian ini ingin melihat pemahaman, komitmen dan sikap dari pengurus dan tim pengelola bank sampah dalam menjalankan tanggung jawabnya. pengurus bank sampah dalam menjalankan tanggung jawabnya sudah bagus karena pengurus program bank sampah Labukkang berkomitmen dengan kuat agar program bank sampah tetap berjalan. Koordinasi dan pembagian tugas dilakukan sesama tim pengelola mengenai tugas sudah baik dimulai dari ketua yang menangani pengelolaan bank sampah dan mengawasi tim pengelolanya mulai dari penjemputan, penimbangan, pemilahan, dan tahap terakhir pencatatan sampai sampah tersebut dapat dijual di pengepul Parepare dan dibantu oleh pengurus bank sampah yang lain. Jika ada salah satu dari tim pengelola yang tidak menjalankan tanggung jawabnya pengelolaan sampah di bank sampah akan mengalami kendala.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Penelitian

Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
Implementasi Program Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare	Standar dan Sasaran Kebijakan	Cukup Baik
	a. Sumber Daya Manusia	Cukup Baik
	b. Sumber Daya Finansial	Kurang Baik
	Hubungan Antar organisasi	Cukup Baik
	Karakteristik Agen Pelaksana	Cukup Baik
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	Kurang baik
	Disposisi Implementor	Cukup Baik

Berdasarkan hasil rekapitulasi maka dapat dikatakan bahwa implementasi program bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat di kelurahan Labukkang Kota Parepare pada indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor sudah cukup baik, namun untuk indikator sumber daya finansial dan kondisi sosial, dan politiknya masih kurang baik hal ini disebabkan oleh indikator sumber daya finansial kelengkapan sarana dan prasarana yang masih belum memadai sehingga dalam pengelolaan bank sampah masih mendapatkan kendala atau hambatan, tidak adanya sumber anggaran dari pemerintah juga menjadi kendala program bank sampah Labukkang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam implementasi program bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kelurahan Labukkang Kota Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Implementasi program bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kelurahan Labukkang. Berdasarkan analisis data dan informasi yang di dapat peneliti maka dapat dikatakan

bahwa implementasi program bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kelurahan Labukkang Kota Parepare belum maksimal. Berdasarkan teori yang digunakan Van Meter dan Van Horn yang mengaju pada enam indikator. Empat indikator cukup baik dan dua indikator kurang baik. Indikator yang cukup baik yaitu standar dan sasaran kebijakan, Hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan disposisi implementor. Sedangkan indikator yang kurang baik yaitu dari sumber daya finansial dan indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu dari faktor sosial dan politik. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bank sampah di Kelurahan Labukkang sudah cukup membantu masyarakat melalui dua jenis tabungan yang diterapkan yaitu tabungan biasa dan tabungan emas yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Meskipun tidak terlalu signifikan namun masyarakat merasa terbantu dengan adanya bank sampah di Kelurahan Labukkang.

SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis untuk bank sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare yaitu:

1. Sumber daya finansial dalam program bank sampah Labukkang kelengkapan sarana dan prasarana masih membutuhkan perhatian. Bank sampah Labukkang untuk kelengkapan sarana dan prasarananya masih dikatakan belum memadai karena jika sarana dan prasarana yang kurang memadai akan mengakibatkan program bank sampah tidak dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah perlu memperhatikan bank sampah yang masih beroperasi, karena dengan adanya bank sampah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah sampah yang sampai sekarang belum bisa teratasi. Bentuk perhatian dan tanggungjawab pemerintah terhadap program bank sampah dapat dilakukan dengan memberikan dana insentif untuk pelaksanaan kegiatan bank sampah dan peningkatan sarana dan prasarana.
2. Masih banyaknya masyarakat Kelurahan Labukkang yang belum memanfaatkan program bank sampah ini. Masyarakat khususnya nasabah bank sampah Labukkang harus menjadi lebih aktif lagi berpartisipasi di bank sampah. Masyarakat harus aktif baik itu transaksi maupun kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Sedangkan masyarakat non nasabah bank sampah Labukkang diharapkan dapat mendukung operasional bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan*. Alfabeta, CV.
- Agustino, L. (2016). *Dasar dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, CV.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis* (C. Press (ed.)).
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif* (Suryani (ed.); 3rd ed.). Bumi Aksara.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (kedua). Erlangga.
- Noor, J. (2017). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Pertama). KENCANA.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi kebijakan)* (S. S. I. (SSID) Development (ed.)).
- Suharno. (2016). *Dasar dasar Kebijakan Publik; Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak.
- Yudiyanto, Yudistira, E., & Tania, A. L. (2019). *Pengelolaan Sampah*. Sai wawai Publishing.
- Ayuningtyas, G., Pratiwi, R. D., & Yulianti, A. (2020). *Pemilahan Sampah Metode 3R Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Cluster Casablanca Bukit Dago*. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1, 89.
- Cahyadi, A., Andy, S., & Fatih, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga*. *Jurnal Sriwijaya*, 2(2), 25–35.
- Dita Pratiwi. (2018). *Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara

- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Jurnal Business Studies*, 4, 51.
- Elena. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare. Universitas Hasanuddin.
- Fatmawati Fatmawati, Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah Abdillah. (2022). Implementasi kebijakan bank sampah melalui kolaboratif: studi banding Makassar dan Bantaeng, Indonesia. Universitas Negeri Makassar.
- Haerul., Akib, H., Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1, 17.
- Kurniawati, F. (2018). Implementasi Program Bank Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Universitas Brawijaya.
- Octaviani,R., & Sutriani, E. (2019). Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data. Sorong.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Publik*, 11, 2.
- Reski Ashariani. (2021). Strategi Pengelolaan Bank Sampah Sektor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Setiawati, Sri, R. A. (2018). Implementasi Program Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Lingkungan Komunitas Bank Sampah Wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor. *Lentera Akuntansi*.
- Suaraya. (2021). Dukung Program Wali Kota Parepare Pemulihan Ekonomi, DLH Siap Optimalkan Bank Sampah. *Www.Suaraya.News*. <https://suaraya.news/2021/02/03/dukung-program-wali-kota-parepare-pemulihan-ekonomi-dlh-siap-optimalkan-bank-sampah/>
- Dalle Darwaty. (2021). Dewan dan DLH Parepare Intens Sosialisasikan Perda Pengelolaan Sampah. *www.sindonews.com*. <https://makassar.sindonews.com/read/520864/713/dewan-dan-dlh-parepare-intens-sosialisasikan-perda-pengelolaan-sampah-1629814114>.
- Koestomo, A.C. (2011). *Pengelolaan Sampah*. Diklat Sampah,5.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota ParePare Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai